

GERAKAN DEMOKRASI DELIBERATIF ORGANISASI EKSTRA KAMPUS UNESA

Lukman Amin

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

mamen1991@gmail.com

Pambudi Handoyo

Dosen S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

pam_pam2013@yahoo.co.id

Abstrak

Pelaksanaan demokratisasi di negeri ini memerlukan respon dan kepekaan dari masyarakat tentang posisi masyarakat sebagai aktor dalam sistem ini. Salah satu yang harus diperkuat adalah masalah *civil society*. Gerakan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi yang berlangsung di negara ini. Beberapa tonggak sejarah menunjukkan peran mahasiswa yang sangat vital. Beberapa perubahan rezim dalam konstelasi politik Indonesia selalu melibatkan peran mahasiswa sebagai aktor. Mahasiswa sebagai wujud partisipasi golongan intelektual dalam upaya menentukan arah pendulum kepemimpinan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Negeri Surabaya. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive*. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan setiap gerakannya organisasi ekstra kampus selalu melalui proses pembentukan ruang publik. Pembentukan ruang publik ini dijalankan untuk membangun suatu opini mahasiswa terkait suatu permasalahan di ranah kampus yang perlu mendapat respon dari arus bawah dan merupakan proses awal demokrasi deliberatif. Selain itu, ruang publik organisasi ekstra kampus UNESA, ruang publik menjadi sarana komunikasi antar mahasiswa dalam membahas setiap problematika di ranah kampus yang perlu mendapatkan tanggapan secara langsung dan memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap organisasi ekstra kampus. Terakhir adalah tindakan komunikatif organisasi ekstra kampus yang berbentuk suatu pandangan dari organisasi ekstra kampus serta penyikapan dalam merespon kebijakan kampus. Pandangan dari organisasi ekstra kampus merupakan cara pandang dari organisasi ekstra kampus dalam mengkritisi kebijakan kampus.

Kata Kunci: Ruang publik, Demokrasi Deliberatif, Organisasi dan Mahasiswa.

Abstract

Implementation of democratization in the country requires a response and sensitivities of people about the position of the communities as actors in this system. One of which must be reinforced is a matter of civil society. The student movement cannot be separated from the process of democratization that took place in the country. Some milestone demonstrates the role of student who is very vital. Several future modifications of the regime in Indonesia's political constellation always involves the role of students as actors. Students as a form of participation of the intellectuals in an effort to determine the direction of the pendulum's leadership of the country. This research uses qualitative research methods with the case study approach, of fenomenology. This study take place in Surabaya State University. The techniques used in the selection of the informant i.e., purposive manner. In the meantime, for data gathering techniques in this study using two ways: primary and secondary. Whereas, data analysis techniques used are qualitative, descriptive methods. The results of this research is in running any extra campus organization movement has always been through the process of the formation of public spaces. The creation of public space is run to establish a student opinion regarding a matter in the realm of the campus that need to get response from the Undertow and a inception process of deliberatif democracy. Next up is the public space extra campus organization UNESA, public space becomes a means of communication between students in discussing any problems in the realm of the campus that need to obtain responses directly and dimensionally different Extras each organization on campus. Communicative action is the last extra campus organization in the form of a view of the campus as well as how the extra organization in responding to the policies of the College. The views of the organizations on campus is a great way of extras from the extra organization campus in critiquing campus policies.

Keywords: *Public space, Organization, Deliberatif Democracy and Students.*

PENDAHULUAN

Masyarakat tidak secara bebas menyuarakan aspirasi dan kritik-kritiknya terhadap pemerintah. Rezim Orde Baru dengan kekuatan militernya menjadikan masyarakat terdiam (*silent people*). Kini setelah sistem yang telah lama memenjara kebebasan berpendapat yang menjamin hak-hak asasi manusia runtuh. Demokrasi menjadi penerang dalam gelapnya rezim Orde Baru dengan meniscayakan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan negara. Masa awal ini menjadi proses interpretasi yang panjang bagi masyarakat untuk mencapai substansi dari demokrasi. Proses interpretasi akan demokrasi yang membutuhkan waktu yang lama ini menyiratkan bahwa setelah Orde Baru runtuh tidak serta merta negara ini menjadi demokratis. Untuk menjadi negara yang demokratis membutuhkan suatu kemauan politik yang kuat dari segenap elemen masyarakat. Ketidakpastian hingga dalam proses penataan kehidupan politik yang lebih demokratis. Melihat proses-proses politik yang sedang berjalan dalam tingkat elit maupun massa belum berhasil ditemukan titik pandang yang sama tentang bagaimana hidup demokrasi secara *par excellence* karena dalam proses ini memerlukan pembentukan budaya madani (*civic culture*) dalam masyarakat (Arifin, 2003:5).

Pembentukan budaya madani (*civic culture*) menjadi penting dalam demokrasi. Dalam mewujudkan demokrasi bukan pekerjaan mudah, demokrasi memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yang paling penting adalah tersedianya lapisan masyarakat yang disebut dengan *civil society*. Pembentukan budaya madani dalam masyarakat akan dapat melahirkan *civil society* dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Tugas awal yang harus dipenuhi dalam rangka merealisasikan demokrasi adalah menciptakan masyarakat madani melalui pembentukan budaya madani (*civic culture*).

Demokrasi Deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga Negara. Dengan kata lain, model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim suatu legitimitas mereka. Akan tetapi, opini-opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas terbentuk sedemikian rupa sehingga

seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu. Melalui penjelasan di atas, kita dapat mengerti bahwa demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. (Hardiman, 2009: 128-129)

Praktik *civil society* dapat diukur melalui partisipasi dalam politik kampus yang berkaitan dengan *student government*. Hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang berpartisipasi dalam segala bentuk proses demokrasi di kampus, baik secara individu maupun organisasi. Selain itu dapat pula dilihat bentuk-bentuk penegakan demokrasi di kampus. Ini terkait dengan *civic culture*, dimana budaya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik kampus menyangkut kesadaran berpolitik yang menjadi fondasi dari *civil society* di kampus. Gerakan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi yang berlangsung di Negara ini. Beberapa tonggak sejarah menunjukkan peran mahasiswa yang sangat vital. Beberapa perubahan rezim dalam konstelasi politik Indonesia selalu melibatkan peran mahasiswa sebagai aktor.

Dalam membahas organisasi mahasiswa saat ini terdapat penggolongan jenis organisasi, yakni organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus adalah organisasi yang berada secara langsung dibawah birokrasi kampus dari level jurusan, fakultas dan universitas. Organisasi ekstra kampus sangat berbeda dengan organisasi intra kampus, organisasi ini berada dalam posisi independen karena tidak memiliki garis secara struktural dari birokrasi kampus.

Dalam segi peran organisasi ekstra kampus justru memiliki peran yang besar khususnya dalam proses demokratisasi kampus. Melalui gerakannya organisasi ekstra kampus menjadi bagian dalam gerakan demokrasi di ranah kampus maupun dalam skala regional maupun nasional. Organisasi ekstra menjadi ujung tombak di ranah kampus dalam membangun iklim yang demokratis dalam kegiatan politik. Perkembangan ideologisasi inilah yang mendorong mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah tentang perjudian undian berhadiah dan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri (Arif pandu Wijanarko, 2009:66). Artikel ini membahas tentang bagaimana bentuk gerakan demokrasi deliberatif dari organisasi ekstra kampus Unesa

KAJIAN TEORITIK

Gerakan Demokrasi Deliberatif

Masyarakat memerlukan ruang publik (*public sphere*) yang mampu menampung aspirasi-aspirasi dari mereka sehingga mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut Jurgen Habermas dalam Bantas melalui demokrasi deliberatifnya, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat. (Bantas, 2010:30). Sehingga negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman, tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi yang vokal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu.

Dalam rangka mengatasi kompleksitas pada masyarakat modern yang memiliki kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai, Habermas mempunyai keyakinan bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus. (Hardiman, 2007:126) Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam itu, bagi Habermas, hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif.

Untuk mencapai konsensus rasional yang diterima umum, Habermas mengajukan tiga prasyarat komunikasi sebagai berikut: *Pertama* keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. *Kedua*, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggungjawab sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka. *Ketiga*, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus

berkat “paksaan tidak memaksa dari argumen yang lebih baik”. (Hardiman, 2007:130)

Habermas menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik harus bersifat otonom, tanpa intervensi dari pemerintah. Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. (Hardiman, 2009: 128)

Ruang publik tidak dapat dibatasi, dimana ada masyarakat yang berkomunikasi, berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitulah akan hadir ruang publik. Ruang publik berifat bebas dan tidak terbatas. Ia tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun kepentingan-kepentingan politik. Pada gagasan teori politik demokrasi deliberatif, Habermas optimis bahwa jurang pemisah yang ada antara lembaga pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan lembaga non-pemerintah (para akademisi, pers, cendekiawan, mahasiswa, aktifis LSM, dan sebagainya), dapat terjembatani lewat jalan komunikasi politis. Menurut Habermas, masyarakat kompleks dapat membendung imperatif-imperatif kapitalisme dan desakan-desakan birokrasi negara dengan cara menyambungkan antara sistem politik demokrasi deliberatif dengan ruang publik. (Hardiman, 2009: 133)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ilmiah yaitu peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh peneliti di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari subjeknya dan berusaha menghubungkan dengan teori-teori yang ada. Penelitian ini dilakukan di kawasan UNESA karena banyak sekali organisasi ekstra kampus yang berada disana. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive*, di mana peneliti sudah menentukan informan yang

*)Terima kasih kepada Moh Mudzakir selaku masukan berharga terhadap naskah ini.

mitra bestari yang telah mereview dan memberi

dianggap cukup tahu dalam kegiatan tersebut. Peneliti telah menentukan beberapa subjek yang terlibat dalam gerakan demokrasi organisasi ekstra kampus.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan melakukan *interview* secara langsung terhadap informan penelitian. Selanjutnya, setelah data terkumpul dari para informan kemudian dilakukan analisis. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang berusaha memahami kehidupan sehari-hari. Dengan cara memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi ekstra merupakan manifestasi dari bentuk gerakan demokrasi di ranah kampus. Gerakan demokrasi deliberatif yang dilakukan oleh beberapa organisasi ekstra kampus di Unesa menjadi pilar-pilar penting dalam melakukan proses konsolidasi demokrasi kampus. Penguatan dalam hal demokrasi kampus dipimpin oleh partisipasi dan gerakan demokrasi dari organisasi ekstra khususnya dalam mengawal kebijakan kampus dan menumbuhkan partisipasi dari arus bawah yakni mahasiswa. Peranan ini dilakukan oleh organisasi ekstra kampus dalam menjalankan setiap aktivitasnya di ranah kampus. Partisipasi secara organisatoris memberikan sumbangsi besar terhadap penegakan dan konsolidasi demokrasi kampus di Unesa.

Proses Pembentukan Ruang Publik

Pembentukan ruang publik ini dijalankan untuk membangun suatu opini mahasiswa terkait suatu permasalahan di ranah kampus yang perlu mendapat respon dari arus bawah. Pembentukan ruang publik adalah medium awal bagi organisasi ekstra kampus dalam melakukan gerakan demokrasi deliberatif di ranah kampus. Proses ini menjadi embrio bagi gerakan-gerakan organisasi ekstra kampus selanjutnya. Pembentukan ruang publik dilakukan dengan membangun komunikasi dengan organisasi ekstra kampus lain dalam merespon kebijakan kampus yang tidak memihak pada kepentingan mahasiswa. Beberapa organisasi ekstra kampus membentuk ruang publik sebagai kekuatan dalam menyikapi setiap kebijakan dari birokrasi kampus.

Hal ini diperkuat dari beberapa penjelasan dari subjek penelitian terkait tindakan komunikatif dari organisasi ekstra kampus. Tindakan komunikatif yang dilakukan oleh SMI ada beberapa bentuk dalam menjalankan kegiatan secara organisasi. Menurut subjek komunikasi bagi organisasi tidak bias ditinggalkan dan menjadi sesuatu yang fundamental. Dalam tindakan komunikatifnya SMI melakukan safari organisasi untuk membangun komunikasi dengan ormek lain. Safari organisasi adalah praktik komunikasi antara SMI dengan ormek lain khususnya untuk pengkonsolidasian gerakan aliansi. Selanjutnya SMI membuka ruang diskusi secara umum untuk membahas isu-isu kampus atau isu nasional. Dari diskusi ini SMI mencoba melakukan persamaan perspektif dalam pandangan dan pernyataan sikap.

PMII dalam membangun ruang publik diwujudkan dalam membangun komunikasi dengan lintas organisasi ekstra dalam membahas permasalahan internal kampus. PMII mengagendakan secara rutin untuk membuka ruang diskusi ormek dalam membahas isu-isu nasional sampai masalah kampus. Diskusi ini biasanya dilakukan di salah satu tempat di kampus yang mengundang semua ormek di Unesa untuk berdialog dan mencapai suatu rekomendasi bersama. Selain itu PMII juga pernah keliling komisariat ormek lain untuk membangun jaringan dan komunikasi diantara ormek. Menurut subjek PMII dalam membangun demokrasi di kampus tidak bias berjalan sendiri, kesatuan dari ormek-ormek Unesa akan memperkuat gerakan dalam mendukung terciptanya iklim kampus yang demokratis

Pembentukan ruang publik dari IMM dalam kegiatan politik kampus. Dalam pembentukan ruang publik ini IMM membangun komunikasi dengan setiap organisasi ekstra kampus atau organisasi intra kampus. Komunikasi ini cenderung membahas permasalahan seputar masalah internal kampus khususnya dalam mengawal dan mengkritik kebijakan dari birokrasi kampus. Beberapa permasalahan juga pernah menjadi perhatian IMM dengan ormek lain seperti penerapan dana BPKP, dana UKT dan rencana pengurusan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area Telkom. Tindakan komunikatif ini dimulai dalam bentuk ruang diskusi antar ormek dalam membahas suatu masalah. Dalam diskusi tersebut terdapat pernyataan pandangan dan sikap dari ormek terkait permasalahan yang diangkat. Setelah

itu persamaan perspektif dilakukan dan diakhiri dengan kesepakatan dalam bentuk penyikapan baik dalam bentuk demonstrasi maupun bentuk-bentuk lain.

Pembentukan ruang publik dari GMNI adalah dengan membangun komunikasi dengan beberapa organisasi ekstra lain untuk mengontrol pihak birokrasi kampus. Hal ini diwujudkan dalam bentuk ruang diskusi yang dihadiri oleh beberapa ormek lain. Diskusi menjadi ruang publik bersama dengan ormek-ormek lain dalam membahas seputar problematika kampus yang terjadi. Tindakan komunikatif lain khususnya dalam bidang internal organisasi diwujudkan dengan bentuk kaderisasi GMNI. kaderisasi ini memiliki tiga tingkatan mulai dari kaderisasi tingkat dasar (KTD), kaderisasi tingkat menengah (KTM) dan kaderisasi tingkat pertama (KTP).

HMI berkaitan dengan hubungannya secara eksternal dengan ormek-ormek lain atau beberapa pihak lain. HMI sebenarnya tidak terlalu aktif dalam komunikasi dengan ormek tapi seringkali mengikuti kegiatan yang diagendakan beberapa ormek lain. Komunikasi ini menjadi suatu modal dalam bergerak bersama mendukung terciptanya kampus yang demokratis. Selain itu HMI juga tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak rektorat dan para kadernya diberikan kebebasan dalam komunikasi ini. Komunikasi ini sangat penting dalam mendukung eksistensi HMI sebagai organisasi ekstra kampus di Unesa. tindakan komunikatif juga terdapat dalam ruang diskusi dan tulisan-tulisan di media sosial yang dilakukan oleh HMI.

Untuk dapat membentuk ruang publik, Habermas mengajukan tiga prasyarat komunikasi sebagai berikut: *Pertama* keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan. *Kedua*, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus. *Ketiga*, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus berkat paksaan tidak memaksa dari argumen yang lebih baik. (Hardiman, 2007:130)

Proses pembentukan ruang publik dari organisasi ekstra kampus ini juga bersandar pada konsensus umum antar organisasi ataupun dalam internal organisasi. konsensus ini memenuhi tiga prasyarat yang diajukan oleh Habermas. Dalam konsensus para mahasiswa menggunakan bahasa yang sama dalam mematuhi aturan. memiliki kesempatan yang sama dalam diskursus karena organisasi ekstra kampus ini tidak memihak dan memandang para anggota lain sebagai pribadi yang otonom. Dalam konsensus yang dipilih oleh organisasi ekstra kampus ini terdapat aturan-aturan yang tersirat yang harus dipatuhi oleh para anggota konsensus ini sehingga dapat menghindarkan pada diskriminasi dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Dari proses-proses yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus ini akhirnya membentuk suatu ruang publik bersama dalam membahas problematika kampus. Beberapa organisasi ekstra kampus sepakat membentuk suatu konsensus bersama dalam merespon dan menanggapi kebijakan kampus. Ruang publik yang disepakati adalah dalam bentuk wadah aspiratif dari beberapa organisasi ekstra kampus yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi. Partisipasi dari mahasiswa dapat dituangkan melalui argumen dan pandangan terkait permasalahan kampus yang diangkat. Ruang publik ini adalah hasil manifestasi peran organisasi ekstra kampus dalam menyikapi isu kebijakan birokrasi kampus yang tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa.

Ruang Publik Organisasi Ekstra Kampus Unesa

Ruang publik menjadi suatu wadah aspirasi secara representatif yang mewakili keadaan dari masyarakat sipil. Dalam konteks masalah ini ruang publik menjadi *medium* dari beberapa organisasi ekstra kampus dalam menjalankan kegiatannya khususnya dalam memperkuat basis gerakan arus bawah di ranah kampus. Ruang publik menjadi sarana komunikasi antar mahasiswa dalam membahas setiap problematika di ranah kampus yang perlu mendapatkan tanggapan secara langsung. Organisasi ekstra kampus memiliki ruang publik sebagai sarana komunikasi dan penyamaan sikap dalam membahas seputar kebijakan dari birokrasi kampus yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan mahasiswa di tingkat *grass root*. Dalam perjalanan gerakan demokrasi di Unesa beberapa organisasi ekstra kampus telah membangun ruang publik bersama dalam

*)Terima kasih kepada Moh Mudzakir selaku masukan berharga terhadap naskah ini.

mitra bestari yang telah mereview dan memberi

menyikapi beberapa kebijakan dari pihak birokrasi kampus Unesa.

Menurut Habermas secara tegas ruang publik memiliki peranan penting dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik ini juga memiliki peranan yang penting dalam menjembatani komunikasi antar organisasi ekstra dalam membahas tentang opini, kepentingan dan kebutuhan mahasiswa di ranah kampus. Ruang publik ini juga menjadi suatu wadah aspirasi dan pernyataan sikap dari tatanan tingkat mahasiswa dalam mengawal kebijakan kampus. Ruang publik ini juga menjadi sarana dalam menumbuhkan *civil society* di ranah kampus atau bisa disebut dengan *civil student*.

Organisasi ekstra kampus Unesa memiliki beberapa ruang publik yang sering digunakan untuk menyikapi kebijakan dari pihak birokrasi kampus. Ruang publik ini menjadi sarana antar organisasi ekstra kampus dalam membangun komunikasi bersama menyikapi isu-isu seputar kampus. Ruang publik yang sering digunakan oleh beberapa organisasi ekstra kampus di Unesa adalah ruang diskusi. Ruang diskusi menjadi sarana yang efektif dalam membangun komunikasi dan membahas permasalahan seputar kebijakan kampus. Selain itu juga ruang publik ini menjadi suatu wujud aspirasi bagi mahasiswa melalui opini kumpulan beberapa organisasi ekstra kampus terkait isu-isu di ranah kampus. Dari ruang diskusi ini menghasilkan suatu keputusan bersama atau pernyataan sikap terhadap permasalahan kampus yang dibahas bersama.

Ruang diskusi dari organisasi ekstra kampus ini menampung aspirasi-aspirasi sehingga mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari birokrasi kampus. Aspirasi-aspirasi ini merupakan representasi dari mahasiswa di tataran arus bawah dalam menyikapi kebijakan birokrasi kampus yang khususnya tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa. Menurut Jurgen Habermas dalam Bantas melalui demokrasi deliberatifnya, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat. (Bantas, 2010:30). Dalam konteks ini kampus tidak lagi menentukan kebijakan-kebijakan politiknya dalam ruang tertutup yang nyaman, tetapi mahasiswa melalui

organisasi ekstra kampus melalui media dan organisasi yang vokal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan kebijakan kampus bagi mahasiswa.

Dalam perjalanan eksistensinya, organisasi ekstra kampus melakukan pengawalan kebijakan kampus yang diberlakukan dalam kehidupan kampus. Terdapat beberapa momentum dalam membangun ruang publik baik secara internal organisasi atau lintas organisasi ekstra kampus. Momentum ini berdasarkan atas penerapan suatu kebijakan birokrasi kampus yang ditujukan kepada mahasiswa dan kelompok mahasiswa merespon kebijakan ini dalam beberapa bentuk. Semua respon diawali dengan membangun suatu opini mahasiswa melalui ruang publik yang dibuka bagi mahasiswa di unesa membahas dan mengupas permasalahan kebijakan yang baru diterapkan oleh birokrasi kampus. Dalam pembahasan ini bermuara pada suatu pernyataan sikap dan membentuk suatu aliansi gerakan bersama dalam merespon kebijakan yang tidak berpihak pada mahasiswa.

Program kerja dari SMI yang lebih praktis dengan melakukan penyikapan isu-isu internal di kampus dan pengkonsolidasian gerakan. Program kerja ini menunjukkan respon dan pernyataan sikap terkait kebijakan di ranah kampus. Program kerja dari SMI diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi sebagai respon terhadap seputar isu-isu kampus dan membentuk ruang diskusi dalam membahas isu-isu tersebut. Isu-isu yang menjadi perhatian SMI lebih terkait dengan kebijakan dari birokrasi kampus, misalnya masalah kenaikan SPP dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT) sampai pada penetapan DO (*drop out*) pada mahasiswa yang telat membayar SPP. Penyikapan isu selalu diawali dalam bentuk diskusi dengan melakukan pengkajian terhadap masalah dan kemudian melakukan demonstrasi sebagai pernyataan sikap.

Terkait tentang ruang publik, PMII tidak hanya berpartisipasi dalam ruang diskusi antar ormek tetapi juga dalam *output* diskusi tersebut. Dalam pengkajian masalah terkait kebijakan birokrasi kampus kemudian dihasilkan suatu pandangan dari beberapa ormek dan sekaligus pernyataan sikap. Pernyataan sikap ini menghasilkan suatu rekomendasi yang kemudian disepakati dalam beberapa bentuk. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian PMII adalah masalah pemberlakuan pembayaran dana BPKP tahun 2011. Bersama beberapa ormek lainnya seperti gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia (GMNI)

dan serikat mahasiswa Indonesia (SMI), PMII tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Unesa (KAMU) untuk menolak dana BPKP. Dalam aksinya tersebut KAMU menolak penerapan dana BPKP yang dinilai tidak tepat sasaran dan alurnya sangat tidak jelas. Demosntrasi dilakukan di rektorat untuk menuntut pihak rektorat mencabut dan membatalkan pemberlakuan dana BPKP bagi mahasiswa Unesa angkatan tahun 2011.

Dalam partisipasi dalam kegiatan politik kampus, GMNI memiliki bentuk-bentuk kegiatan atau ruang publik yang dirintisnya. Menurut subjek dalam melakukan gerakan biasanya diawali dari proses diskusi baik dalam internal GMNI atau lintas ormek dengan membahas seputar permasalahan kampus dan juga sebagai respon terhadap terbitnya suatu produk dari birokrasi kampus. Ruang diskusi ini menjadi suatu dialektika bagi mahasiswa dalam melakukan analisis sosial terhadap setiap kebijakan kampus khususnya yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa. GMNI pernah melakukan diskusi bersama dengan ormek PMII dan SMI dalam menyikapi pemberlakuan dana BPKP bagi mahasiswa baru. Ruang diskusi ini membahas seputar dana BPKP yang diberlakukan oleh pihak rektorat yang dinilai tidak berpihak pada mahasiswa. Kemudian tiga ormek ini menyepakati membentuk aliansi gerakan yang diberi nama kesatuan aksi mahasiswa Unesa (KAMU). Setelah aliansi ini terbentuk kemudian tiga ormek ini dalam beberapa diskusi menyepakati untuk menyatakan penyikapan yang menolak dana BPKP.

Dalam rangka menumbuhkan *civil society*, HMI melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai iklim kampus yang demokratis bagi para mahasiswa. Diskusi menjadi salah satu kegiatan utama dalam menumbuhkan *civil society* dikalangan mahasiswa untuk turut aktif dalam mewujudkan kampus yang demokratis. HMI juga membuat tulisan di sosial media untuk merangsang nalar kritis dan kepekaan dari para mahasiswa yang membaca dan menggugah mahasiswa untuk responsif atas setiap keadaan. Untuk menyempurnakan beberapa kegiatan sebelumnya HMI juga melakukan penbyadaran secara wacana untuk mewujudkan partisipasi aktif bagi mahasiswa dalam kehidupan kampus. Hal ini merupakan tuntutan dalam sistem kampus yang demokratis dimana tersedia *civil society* yang mendukung iklim kampus yang demokratis.

Ruang publik harus bersifat otonom, tanpa intervensi dari pemerintah. Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik dari organisasi ekstra kampus ini bersifat otonom lepas dari pengaruh birokrasi kampus. Ruang publik ini merupakan sarana antar mahasiswa dalam berkomunikasi dan berargumen serta untuk menyatakan sikap terkait kebijakan kampus yang dikeluarkan. Ruang publik yang berbentuk ruang diskusi ini sangat efektif dalam membentuk suatu opini mahasiswa untuk mempengaruhi kebijakan birokrasi kampus yang bertentangan dengan mahasiswa. Dalam beberapa momentum ruang diskusi ini berhasil membentuk suatu gerakan aliansi mahasiswa dalam menolak dan menuntut kebijakan kampus seperti kebijakan DO dan penerapan dana BPKP (biaya peningkatan kualitas perkuliahan).

Ruang publik berifat bebas dan tidak terbatas serta tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun kepentingan-kepentingan politik. Ruang publik dari organisasi ekstra kampus ini dijalankan tanpa ada tendensi-tendensi politik dari golongan elit kampus. Ruang diskusi murni dijalankan atas dasar prinsip demokrasi dengan partisipasi dari golongan mahasiswa dalam merespon setiap kebijakan dari kampus. Ruang diskusi ini juga menumbuhkan partisipasi dari mahasiswa sehingga terwujudlah *civil student* dalam dinamika politik kampus. Hal ini menjadi suatu prasyarat dalam pengembangan demokrasi dalam ranah kampus. Dalam tatanan demokrasi yang telah di usung partisipasi dari mahasiswa dalam konteks ini sangat fundamental sehingga dengan adanya ruang diskusi memberikan ruang publik bagi mahasiswa dalam berpartisipasi secara politik.

Tindakan Komunikatif Organisasi Ekstra Kampus

Gerakan demokrasi dari organisasi ekstra kampus ini memberikan sumbangsi atas pembangunan demokrasi di ranah kampus. Melalui identifikasi gerakan demokrasi yang berwujud tindakan komunikatif mahasiswa dan ruang publik mahasiswa dalam menyikapi kebijakan dari birokrasi kampus dapat dijelaskan peranan gerakan demokrasi bagi konsolidasi demokrasi kampus. Dalam hal ini pembangunan demokrasi dilihat dari perspektif partisipasi dari mahasiswa dalam

*)Terima kasih kepada Moh Mudzakir selaku masukan berharga terhadap naskah ini.

mitra bestari yang telah mereview dan memberi

kegiatan politik secara khusus dalam merespon dan membangun opini terkait *output* dari birokrasi kampus. Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa organisasi ekstra kampus dalam memimpin gerakan demokrasi untuk menumbuhkan peran dari mahasiswa dalam kegiatan politik kampus. Peran dari organisasi ekstra kampus sangat vital dalam menyediakan ruang publik bagi mahasiswa sebagai wadah aspirasi terhadap pihak birokrasi kampus.

Ruang publik ini menjadi ruang aspiratif dari mahasiswa dalam melakukan penyikapan terhadap kebijakan kampus yang tidak berpihak pada mahasiswa. Melalui ruang publik ini mahasiswa dapat berargumen dan memberikan pandangan terkait problematika kampus serta diwujudkan dalam suatu sikap bersama dalam merespon kebijakan kampus tersebut sebagai tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus. (Hardiman. 2007:126) Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam itu, bagi Habermas, hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif.

Tindakan komunikatif dari organisasi ekstra kampus merupakan kelanjutan dari ruang publik yang telah terbentuk. Tindakan komunikatif berbentuk suatu pandangan dari organisasi ekstra kampus serta penyikapan dalam merespon kebijakan kampus. Pandangan dari organisasi ekstra kampus merupakan cara pandang dari organisasi ekstra kampus dalam mengkritisi kebijakan kampus. Penyikapan dalam hal ini merupakan langkah konkrit kelanjutan dari pandangan yang dilakukan oleh antar organisasi ekstra kampus yang berwujud media tertulis sampai dengan demonstrasi dalam merespon kebijakan kampus. Bentuk pandangan dan penyikapan ini menunjukkan peran dari gerakan deliberatif organisasi ekstra kampus dalam mengawal kebijakan dari birokrasi kampus.

Salah satu contoh adalah terkait penyikapan dari beberapa organisasi ekstra kampus dalam menyikapi penerapan dana BPKP atau kenaikan SPP di Unesa. Beberapa organisasi ekstra kampus membangun ruang diskusi bersama dalam menyikapi kebijakan ini dan akhirnya sepakat dalam membentuk suatu aliansi mahasiswa untuk

melakukan penolakan dalam bentuk demonstrasi terhadap pihak rektorat. Ruang publik yang dibentuk ini sangat efektif dalam menumbuhkan partisipasi dan membangun suatu opini publik untuk mempengaruhi kebijakan dari birokrasi kampus ini. Ruang publik ini menghasilkan suatu pandangan tentang penolakan kebijakan tersebut serta demonstrasi yang dilakukan untuk menolak kebijakan tersebut. Penolakan ini dilakukan melalui wadah aspiratif yang bernama kesatuan aksi mahasiswa Unesa (KAMU).

Aliansi organisasi ekstra kampus juga menyoroti permasalahan kebijakan kampus yang menetapkan DO (*drop out*) kepada beberapa mahasiswa yang terlambat membayar SPP. Aliansi organisasi ekstra kampus ini melakukan pengawalan kebijakan tersebut melalui pembentukan ruang publik yang menghasilkan pandangan dan penyikapan. Bentuk penyikapan dari organisasi ekstra kampus diwujudkan dengan bentuk demonstrasi kepada pihak rektorat sebagai pemegang kebijakan DO tersebut. Penyikapan ini sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa kebijakan tersebut tidak memihak pada keadaan mahasiswa. Hal ini merupakan tindakan komunikatif dari aliansi organisasi ekstra kampus dalam mengawal kebijakan kampus yang tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa.

Ruang publik dan tindakan komunikatif yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus merupakan manifestasi gerakan demokrasi deliberatif. Organisasi ekstra kampus mengambil peran dalam menumbuhkan ruang publik di ranah kampus. Hal ini menunjukkan usaha dari organisasi ekstra kampus sebagai gerakan arus bawah yakni golongan mahasiswa di ranah kampus. Ruang publik dari organisasi ekstra kampus menjadi salah satu wacana publik dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan birokrasi kampus. Peran organisasi ekstra kampus menumbuhkan *civil society* di ranah kampus dalam melakukan pengawalan pada setiap kebijakan kampus sesuai tuntutan sistem demokrasi. Kampus tidak bisa bebas dalam memutuskan setiap kebijakan, terdapat pengaruh dari arus bawah dalam mengontrol kebijakan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Ruang publik menjadi suatu wadah aspirasi secara representatif yang mewakili keadaan dari

masyarakat sipil. Dalam konteks masalah ini ruang publik menjadi *medium* dari beberapa organisasi ekstra kampus dalam menjalankan kegiatannya khususnya dalam memperkuat basis gerakan arus bawah di ranah kampus. Ruang publik menjadi sarana komunikasi antar mahasiswa dalam membahas setiap problematika di ranah kampus yang perlu mendapatkan tanggapan secara langsung. Organisasi ekstra kampus memiliki ruang publik sebagai sarana komunikasi dan penyamaan sikap dalam membahas seputar kebijakan dari birokrasi kampus yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan mahasiswa di tingkat *grass root*. Dalam perjalanan gerakan demokrasi di Unesa beberapa organisasi ekstra kampus telah membangun ruang publik bersama dalam menyikapi beberapa kebijakan dari pihak birokrasi kampus Unesa.

Organisasi ekstra kampus Unesa memiliki beberapa ruang publik yang sering digunakan untuk menyikapi kebijakan dari pihak birokrasi kampus. Ruang publik ini menjadi sarana antar organisasi ekstra kampus dalam membangun komunikasi bersama menyikapi isu-isu seputar kampus. Ruang publik yang sering digunakan oleh beberapa organisasi ekstra kampus di Unesa adalah ruang diskusi. Ruang diskusi menjadi sarana yang efektif dalam membangun komunikasi dan membahas permasalahan seputar kebijakan kampus. Selain itu juga ruang publik ini menjadi suatu wujud aspirasi bagi mahasiswa melalui opini kumpulan beberapa organisasi ekstra kampus terkait isu-isu di ranah kampus. Dari ruang diskusi ini menghasilkan suatu keputusan bersama atau pernyataan sikap terhadap permasalahan kampus yang dibahas bersama.

Tindakan komunikatif ini dijalankan untuk membangun suatu opini mahasiswa terkait suatu permasalahan di ranah kampus yang perlu mendapat respon dari arus bawah. Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Tindakan komunikatif dari organisasi ekstra kampus ini juga bersandar pada konsensus umum antar organisasi ataupun dalam internal organisasi.

Ruang publik dan tindakan komunikatif yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus merupakan manifestasi gerakan demokrasi deliberatif. Organisasi ekstra kampus mengambil peran dalam menumbuhkan ruang publik di ranah kampus. Hal ini menunjukkan usaha dari organisasi

kampus sebagai gerakan arus bawah yakni golongan mahasiswa di ranah kampus. Ruang publik dari organisasi ekstra kampus menjadi salah satu wacana publik dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan birokrasi kampus. Peran organisasi kampus menumbuhkan *civil society* di ranah kampus dalam melakukan pengawalan pada setiap kebijakan kampus sesuai tuntutan sistem demokrasi. Kampus tidak bisa bebas dalam memutuskan setiap kebijakan, terdapat pengaruh dari arus bawah dalam mengontrol kebijakan tersebut.

Saran

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan demokrasi kampus masih belum menunjukkan tren positif. Dalam tuntutan iklim demokrasi dalam ranah kampus. Mahasiswa harus memiliki kesadaran secara politis dalam mewarnai dinamika proses demokrasi kampus. Dalam menunjang kegiatan demokrasi di ranah kampus perlu menumbuhkan *civil student*. *Civil student* dapat terbentuk melalui pembangunan ruang publik di tatanan mahasiswa. Ruang publik menjadi suatu sarana aspiratif dari tatanan mahasiswa untuk mempengaruhi kebijakan birokrasi kampus, sehingga ruang publik sangat efektif dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Samsul. 2003. *Islam Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Bantas, Hercules. 2010. *Jurgen Habermas and Deliberative Democracy*. Melbourne: The Reclutant Geek.
- Hardiman, Budi F. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Hardiman, Budi F. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kansius.
- Wijanarko, Arif pandu. 2009. "Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia: kajian KAMMI sebagai gerakan mahasiswa pasca reformasi". *Skripsi* Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas adab dan humaniora universitas islam negeri sunan kalijaga.

*)Terima kasih kepada Moh Mudzakir selaku mitra bestari yang telah mereview dan memberi masukan berharga terhadap naskah ini.